



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 38 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN
TAHUN 2023 – 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas perkebunan, penyelesaian status dan legalisasi lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan, dan dalam rangka percepatan tercapainya perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Bulungan;
 - b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024, menginstruksikan kepada Bupati yang daerahnya merupakan penghasil kelapa sawit untuk menyusun rencana aksi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Bulungan Tahun 2023-2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai

Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2021 Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2023-2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Bupati adalah Bupati Bulungan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan.
5. Perangkat Daerah Pelaksana adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menjadi kunci (*leading sector*) dalam pelaksanaan sebuah aksi dan menjalankan fungsi koordinasi.
6. Mitra Pendukung adalah lembaga yang memberikan kompetensi teknis, dukungan pendanaan atau kontribusi lainnya dalam pelaksanaan sebuah rencana aksi.
7. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk

mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

8. Perkebunan Kelapa Sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan dan pemasaran tanaman perkebunan kelapa sawit.
9. Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Bulungan Tahun 2023-2024, yang selanjutnya disebut sebagai RAD KSB adalah dokumen rencana aksi untuk pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas, nilai tambah dan daya saing komoditas kelapa sawit Daerah dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya dan ekologi.
10. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
11. *Indonesian Sustainable Palm Oil* yang selanjutnya disingkat ISPO adalah sistem usaha di bidang Perkebunan Kelapa Sawit yang layak ekonomi, layak sosial dan ramah lingkungan didasarkan pada peraturan-perundangan yang berlaku di Indonesia
12. Sertifikasi ISPO adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian terhadap usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa produk dan/atau tata kelola Perkebunan Kelapa Sawit telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO.
13. Tim Pelaksana Daerah adalah tim yang ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan RAD KSB.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit berkelanjutan di Daerah yang lebih terarah dan terintegritas dalam pelaksanaannya, serta mendapat dukungan para pemangku kepentingan.

- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk
 - a. memberikan pedoman bagi pemangku kepentingan terkait kelapa sawit untuk meningkatkan sinergi, koordinasi, dan komunikasi dalam mencapai tujuan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan; dan
 - b. menyediakan instrumen yang membantu untuk melakukan monitoring dan evaluasi dari kegiatan-kegiatan terkait kelapa sawit berkelanjutan yang telah dilakukan.

BAB II RAD KSB

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan RAD KSB Tahun 2023-2024.
- (2) RAD KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen pembangunan daerah yang disusun dengan mengikutsertakan partisipasi para pihak dalam mendukung pembangunan kelapa sawit berkelanjutan.

Pasal 4

- (1) RAD KSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas komponen:
 - a. penguatan data, penguatan koordinasi, dan infrastruktur;
 - b. peningkatan kapasitas dan kapabilitas Pekebun;
 - c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
 - d. tata kelola Perkebunan dan penanganan sengketa; dan
 - e. dukungan percepatan pelaksanaan Sertifikasi ISPO dan peningkatan akses pasar produk kelapa sawit.
- (2) Dokumen RAD KSB disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan;

BAB II : Integrasi Program dan Kegiatan; dan

BAB III : Penyelenggaraan Rencana Aksi.

- (3) Dokumen RAD KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PELAKSANAAN RAD KSB

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan RAD KSB dilakukan secara koordinatif oleh Tim Pelaksana Daerah, yang terdiri atas Dinas, Perangkat Daerah Pelaksana dan Mitra Pendukung serta dapat mengikutsertakan masyarakat, pelaku usaha dan para pihak terkait Perkebunan Kelapa Sawit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pengurus dan kelompok kerja dengan masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (3) Susunan Pengurus dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. Pembina dijabat oleh Bupati;
 - b. Ketua Tim Pelaksana Daerah dijabat oleh Sekretaris Daerah;
 - c. Ketua Harian dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perkebunan atau pimpinan salah satu unsur multipihak.
 - d. Sekretaris dijabat oleh:
 1. Kepala Bidang OPD yang membidangi perkebunan jika Ketua Harian dijabat oleh Kepala OPD yang membidangi perkebunan; atau
 2. Kepala OPD yang membidangi perkebunan jika Ketua Harian dijabat oleh pimpinan salah satu unsur multipihak.

- e. Ketua Kelompok Kerja (Pokja) dijabat oleh unsur ASN yang memiliki kapasitas dalam bidang kelompok kerja dimaksud;
- f. Anggota Kelompok Kerja berasal dari unsur multipihak antara lain:
 - 1. Perangkat Paerah yang berkaitan dengan pelaksanaan kelapa sawit berkelanjutan;
 - 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan kewenangan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - 3. Swasta, merupakan perwakilan perusahaan perkebunan kelapa sawit, asosiasi pekebun kelapa sawit, asosiasi produsen perbenihan kelapa sawit, dan asosiasi profesi terkait lainnya;
 - 4. Masyarakat, merupakan perwakilan penggiat kelapa sawit, dan tokoh masyarakat terkait, termasuk kelompok perempuan yang terlibat dalam perkebunan kelapa sawit;
 - 5. Perbankan, merupakan lembaga keuangan di tingkat lokal dan nasional yang salah satu kegiatannya memberikan bantuan permodalan dan penguatan ekonomi bagi para pelaku usaha dan pekebun kelapa sawit;
 - 6. Lembaga non pemerintah, merupakan semua lembaga di tingkat daerah, nasional, maupun internasional yang memiliki kapasitas serta keahlian dalam bidang pembangunan berkelanjutan, meliputi lingkungan hidup, ekonomi, sosial, dan budaya; dan
 - 7. Akademisi, merupakan para ahli dari perguruan tinggi serta lembaga penelitian dan pengembangan di bidang terkait kelapa sawit berkelanjutan. Sebagai upaya memastikan pengarusutamaan gender, pihak yang berkompeten dalam pengarusutamaan gender diposisikan dalam Pokja sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.

- g. Panel Pakar terdiri dari: akademisi atau praktisi yang memiliki kompetensi di bidang kelapa sawit berkelanjutan berdasarkan pengalaman yang dimiliki, pembentukan panel pakar disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dapat dibantu oleh tim sekretariat. Apakah maksud rumusan ayat (3)
- (5) Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Bupati melaksanakan RAD KSB melalui Dinas.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan realisasi hasil kegiatan pelaksanaan pencapaian RAD KSB kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan laporan realisasi hasil pelaksanaan kegiatan pencapaian RAD KSB kepada Menteri Dalam Negeri u.p. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Tim Nasional Pelaksanaan RAN-KSB secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan pelaksanaan RAD KSB bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 17 November 2023

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 17 November 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

RISDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2023 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



[Handwritten signature]

SUROSU, SE

Pembina TK.I/IVb

NIP. 197003101993031008

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BULUNGAN
 NOMOR 38 TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA
 SAWIT BERKELANJUTAN TAHUN 2023 – 2024

A. KOMPONEN PENGUATAN DATA, PENGUATAN KOORDINASI DAN INFRASTRUKTUR							
Penerapan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada komponen ini diarahkan antara lain untuk :							
<ol style="list-style-type: none"> mendapatkan data dasar dan informasi pekebun yang akurat dan diperbaharui secara berkala di daerah dengan melibatkan OPD yang membidangi Statistik dan Pertanian (Perkebunan) serta pihak lain yang dinilai berkompeten. memfasilitasi kegiatan pemutakhiran informasi geospasial tematik tutupan kebun kelapa sawit yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan sengketa para pihak karena tumpang tindih penggunaan lahan perkebunan. menyelaraskan berbagai kebijakan untuk menciptakan keberlanjutan industri kelapa sawit melalui peningkatan sinergitas antar OPD terkait dalam pengelolaan perkebunan sawit berkelanjutan. meningkatkan infrastruktur yang mendukung pembangunan industri kelapa sawit berkelanjutan di daerah melalui kolaborasi pemerintah dan swasta. 							
NO	KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN		OPD PELAKSANA	OPD/MITRA PENDUKUNG	PEMBIAYAAN
			2023	2024			
A. KOMPONEN PENGUATAN DATA, PENGUATAN KOORDINASI DAN INFRASTRUKTUR							
1. Program Penguatan Data Dasar Perkebunan Kelapa Sawit Untuk Dukungan Tata Kelola Perkebunan Yang Lebih Baik							
1.1	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	Data Statistik Perkebunan terbaharu minimal 3 bulan sekali	2023	2024	Dinas Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> Badan Pusat Statistik (BPS) Bulungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Bagian Perekonomian & SDA 	DBH Kelapa Sawit APBD APBD
1.2	Penyusunan Rencana Kerja Pelaksanaan Pendataan Pekebun Mandiri dan Koordinasi dengan PPL, Perusahaan Perkebunan, Pemerintah Desa, Kelompok Tani dan Mitra Strategis Melakukan pendataan pekebun (oleh seluruh	Rencana Aksi Pendataan Pekebun Sawit Mandiri 500 STDB	2023	2024	Dinas Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Mitra Pembangunan 	DBH Kelapa Sawit Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) APBD Mitra Pembangunan

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN		OPD PELAKSANA	OPD/MITRA PENDUKUNG	PEMBIAYAAN
			2023	2024			
	pemangku kepentingan sesuai dengan format E-STDB						
1.3	Melakukan himbauan kepada PKS melaporkan data pemasok TBS yang berasal dari pekebun mandiri kepada Pemkab Bulungan	Data Pasokan TBS pekebun mandiri ke PKS	2023	2024	Dinas Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) 2. Bagian Perekonomian & SDA 3. Perusahaan Perkebunan 4. Asosiasi Pekebun 	APBD
1.4	Melakukan pendataan pekebun dan pemetaan lokasi kebunnya, yang diperbarui secara berkala	<p>Tersedianya data pekebun dan peta lokasi kebunnya yang diperbarui secara berkala</p> <p>Tersedianya peta indikatif dari kebun-kebun yang sudah perlu perbaikan dan diremajakan</p>	2023	2024	Dinas Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemdes 2. Gapoktan 3. Mitra Pembangunan 4. Transmigrasi dan Tenaga Kerja 	DBH Kelapa Sawit Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) APBD APBD Provinsi
2. Program Pembinaan penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan kebun kelapa sawit							
2.1	Updating, Kompilasi dan pengintegrasian IGT tutupan kebun sawit	Tersedianya Data Tutupan Kelapa Sawit yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Bulungan	2023	2024	Bappedalitbang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pertanian 2. Kantor Pertanahan ATR/BPN 3. PUPR 4. DPMPSTSP Kabupaten Bulungan 5. Bagian Perekonomian & SDA 6. MITRA PEMBANGUNAN 	DBH Kelapa Sawit Pelaku Usaha Perkebunan APBD

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN		OPD PELAKSANA	OPD/MITRA PENDUKUNG	PEMBIAYAAN
			2023	2024			
						7. Pelaku Usaha 8. APKASINDO 9. BIG	
2.2	Melakukan pelatihan pemetaan partisipatif bagi organisasi perangkat daerah terkait, perusahaan dan masyarakat di lokasi perkebunan	Tersedianya fasilitator pemetaan partisipatif	2023	2024	Dinas Pertanian	1. Kantor Pertanahan ATR/BPN Kab. Bulungan 2. Mitra Pembangunan/NGO	DBH Kelapa Sawit BPDPKS APBN Pelaku Usaha Perkebunan Mitra Pembangunan
2.3	Penyelenggaraan pemetaan perkebunan partisipatif	Terlaksananya pemetaan partisipatif di daerah percontohan dan Sebaran Peta Pekebun serta jalur pasok ke PKS	2023	2024	Dinas Pertanian	1. DPUPR 2. Pelaku Usaha 3. Mitra Pembangunan	DBH Kelapa Sawit BPDPKS Pelaku Usaha Perkebunan Mitra Pembangunan
2.4	Penyusunan Peta Arahan Pengembangan Kelapa Sawit dan Perlindungan Kawasan Bernilai Penting Secara Lingkungan, Sosial dan Ekonomi	Tersedianya peta Arahan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit 2023 – 2043 Tersedianya peta arahan Perlindungan Kawasan Bernilai Penting Secara Lingkungan, Sosial dan Ekonomi	2023	2024	Bappedalitbang	1. Dinas PUPR 2. Dinas Lingkungan Hidup 3. Kantor Pertanahan ATR/BPN Kab. Bulungan 4. Bagian Perekonomian & SDA 5. Asosiasi Pengusaha Perkebunan 6. Organisasi Masyarakat Adat 7. Mitra Pembangunan	DBH Kelapa Sawit APBD Pelaku Usaha Perkebunan Mitra Pembangunan
3. Program Peningkatan sosialisasi regulasi dan kebijakan terkait usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan bagi pekebun dan pemangku kepentingan lainnya							

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN		OPD PELAKSANA	OPD/MITRA PENDUKUNG	PEMBIAYAAN
			2023	2024			
3.1	Menyusun Strategi komunikasi daerah dan rencana sosialisasi yang efektif bagi pekebun dan para pemangku kepentingan lainnya	Rencana Strategi komunikasi daerah dan rencana sosialisasi yang efektif bagi pekebun dan para pemangku kepentingan lainnya	2023		Dinas Pertanian	1. Dinas PUPR 2. Dinas LH 3. Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian 4. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) 5. Bagian Perekonomian & SDA 6. Mitra Pembangunan	DBH Kelapa Sawit APBD
3.2	Sosialisasi ke setiap kecamatan, desa, gabungan kelompok tani : (1) STDB dan kelengkapannya; (2) Praktik Baik Perkebunan atau sertifikasi ISPO; (3) Kebijakan perkebunan daerah dan nasional	Laporan Sosialisasi ke setiap kecamatan, desa, gabungan kelompok tani : (1) STDB dan kelengkapannya; (2) Praktik Baik Perkebunan atau sertifikasi ISPO; (3) Kebijakan perkebunan daerah dan nasional	2023	2024	Dinas Pertanian	1. Bagian Hukum Sekda Bulungan 2. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) 3. Bagian Perekonomian & SDA 4. Pelaku Usaha 5. Mitra Pembangunan	DBH Kelapa Sawit BPDPKS APBN Mitra Pembangunan
4. Program Peningkatan Sinergitas Antar Organisasi Pemerintah Daerah Dalam Hubungannya Dengan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit							
4.1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Review Implementasi Pelaksanaan RAD per tiga bulan	2023	2024	Bagian Ekonomi	1. Tim Pelaksana RAD-KSB	DBH Kelapa Sawit APBD
4.2	Sinkronisasi data dan informasi pada masing-masing OPD	Review data dan informasi per tiga bulan	2023	2024	Bagian Ekonomi		
5. Program Pembentukan Tim Pelaksana Daerah Dalam Bentuk Forum Multi Pihak Kelapa Sawit Berkelanjutan Di Kabupaten Bulungan							

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN		OPD PELAKSANA	OPD/MITRA PENDUKUNG	PEMBIAYAAN
			2023	2024			
5.1	Pembentukan Tim pelaksana daerah dalam bentuk forum multipihak kelapa sawit berkelanjutan di tingkat kabupaten Bulungan	SK Bupati Forum Multi Pihak dan Tugas serta Kewenangan Forum Multi Pihak KSB	2023		Bagian Ekonomi	1. Dinas Pertanian 2. Bappedalitbang 3. DKUKMPP 4. BPS 5. Kantah ATR/BPN 6. Dinas Lingkungan Hidup 7. Dinas Tenaga Kerja 8. Pelaku Usaha 9. Serikat Buruh Perkebunan Sawit 10. Petani Plasma 11. Mitra Pembangunan/NGO	DBH Kelapa Sawit APBD
5.2	Memperkuat Peran Forum Multi Pihak Kelapa Sawit Berkelanjutan dalam pelaksanaan RAD KSB	Sekretariat Forum Multi Pihak dan Tugas serta Kewenangan Forum Multi Pihak KSB	2023	2024	Asisten II	Tim Pelaksana RAD	DBH Kelapa Sawit APBD
6. Program Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Untuk Mendukung Peningkatan Kualitas Usaha Perkebunan Kelapa Sawit							
6.1	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengelolaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Panjang jalan produksi yang akan di rehabilitasi	2023	2024	Dinas Pertanian	1. Dinas PUPRP 2. Pelaku Usaha 3. Organisasi Petani KS	BPDPKS APBN APBD Prov DBH Kelapa Sawit APBD
6.2	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengelolaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani	Tersedianya daftar sarana dan prasarana	2023	2024	Dinas Pertanian	1. Dinas PUPR 2. Pelaku Usaha 3. Organisasi Petani KS	BPDPKS DBH Kelapa Sawit APBD
		Panjang jaringan yang dinormalisasikan	2023	2024	Dinas Pertanian	1. Dinas PUPR 2. DLH 3. ASPEKPIR 4. APKASINDO	DBH Kelapa Sawit APBD

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN		OPD PELAKSANA	OPD/MITRA PENDUKUNG	PEMBIAYAAN
			2023	2024			
6.3	Koordinasi, sinkronisasi dan penataan prasarana pendukung pertanian lainnya : pembinaan dan pengadaan alat pasca panen dan pengolahan hasil komoditi perkebunan	Frekuensi, koordinasi dan sinkronisasi program dan jumlah prasarana yang disediakan	2023	2024	Dinas Pertanian	1. Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) 2. APKASINDO 3. Mitra Pembangunan	DBH Kelapa Sawit APBD
6.4	Pengendalian dan pemanfaatan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian	Jumlah kelompok yang menerapkan sistem integrasi sapi-kelapa sawit		2024	Dinas Pertanian	1. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit 2. Pemdes	DBH Kelapa Sawit APBD
6.5	Pengawasan peredaran sarana pertanian	Ada pengawasan ketersediaan Alat Mesin dan Pupuk Pendampingan pengawasan benih	2023	2024	Dinas Pertanian	1. Perusahaan Sumber Benih 2. Pelaku Usaha 3. APKASINDO	DBH Kelapa Sawit APBD
6.6	Pembangunan Nurseri	Tersedianya Bibit Kelapa Sawit	2023	2024	Dinas Pertanian	1. Perusahaan Perkebunan Sawit 2. Pemdes	BPDPKS DBH Kelapa Sawit APBD

7. Program Peningkatan Kepatuhan Hukum Bagi Pelaku Usaha Dalam Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Secara Koordinatif

7.1	Memperkuat kelompok kerja antar OPD di dalam upaya kepatuhan hukum dalam Tata Kelola Usaha Perkebunan Sawit	Rencana Kerja dan Dukungan Anggaran dalam upaya memperkuat kelompok kerja antar OPD di dalam upaya kepatuhan hukum dalam tata Kelola Usaha Perkebunan Sawit seperti PUP	2023	2024	Asisten II Sekda Kabupaten Bulungan	1. Dinas Pertanian 2. Bappedalitbang 3. Dinas Lingkungan Hidup 4. Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja 5. DPUPR 6. DKUKMPP 7. Bagian Hukum 8. Bagian Perekonomian & SDA	DBH Kelapa Sawit APBD Mitra Pembangunan
-----	---	---	------	------	-------------------------------------	---	---

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN		OPD PELAKSANA	OPD/MITRA PENDUKUNG	PEMBIAYAAN
			2023	2024			
		terpadu dengan melibatkan lintas OPD dan Partisipasi Publik di dalamnya				9. DPMD 10. DPMPTSP 11. Kantor Pertanahan ATR/BPN Bulungan 12. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan 13. Camat	

B. PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS PEKEBUN SERTA PERCEPATAN PEREMAJAAN

Penerapan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada komponen ini diarahkan antara lain untuk:

1. meningkatkan jumlah pekebun yang menerapkan prinsip budidaya yang baik melalui pelatihan teknis budidaya yang berkualitas dalam rangka peningkatan produksi.
2. meningkatkan akses terhadap dana peremajaan tanaman sawit maupun penggunaannya melalui pendampingan OPD kepada pekebun.
3. mempercepat pembentukan dan penguatan kelembagaan pekebun melalui fasilitasi pembentukan dan pendampingan penguatan kelembagaan pekebun untuk meningkatkan posisi tawar, akses perbankan, input produksi dan pemasaran.
4. meningkatkan jumlah dan kompetensi penyuluh/pendamping kelapa sawit melalui program penyuluhan pertanian di daerah.

8. Program Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Pekebun Dalam Penggunaan Benih Bersertifikat

8.1	Melakukan sosialisasi tentang penggunaan benih bersertifikat bagi pekebun	Terselenggaranya sosialisasi tentang penggunaan benih bersertifikat di kelompok tani	2023	2024	Dinas Pertanian	1. Pelaku Usaha 2. Pemilik IUP Benih	BPDPKS DBH Kelapa Sawit APBD
8.2	Pendataan peredaran benih di Kabupaten Bulungan	Tersedianya data peredaran benih di Kabupaten Bulungan	2023	2024			

9. Program Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam menerapkan praktek budidaya yang baik (*Good Agricultural Practices/GAP*)

9.1	Melakukan pelatihan Fasilitator GAP di tingkat pendamping petani oleh pemerintah, maupun kemitraan para pihak secara periodik	Tersedianya Fasilitator GAP di Kabupaten Bulungan	2023	2024	Dinas Pertanian	1. Pelaku Usaha Perkebunan 2. Mitra Pembangunan	BPDPKS DBH Kelapa Sawit APBD Pelaku Usaha Perkebunan Mitra Pembangunan
9.2	Meningkatkan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi di bidang perkebunan kelapa sawit	Meningkatnya kompetensi dibidang perkebunan kelapa sawit	2023	2024	Dinas Pertanian	Pemdes	BPDPKS DBH Kelapa Sawit APBD Pelaku Usaha Perkebunan Mitra Pembangunan

9.3	Menyelenggarakan penyuluhan tentang prinsip GAP bagi pekebun	Terlaksananya kegiatan penyuluhan tentang prinsip GAP pada 8 kelompok pekebun di 8Desa	2023	2024	Dinas Pertanian	1. Pemdes 2. Mitra Pembangunan 3. Pelaku Usaha	BPDPKS DBH Kelapa Sawit APBD Pelaku Usaha Perkebunan Mitra Pembangunan
10. Program Percepatan Pembentukan Dan Penguatan Kelembagaan Pekebun							
10.1	Pelatihan kepada Penyuluh Pertanian Lapangan Pemkab dan Fasilitator Pendamping Petani dalam Penguatan Kelompok Pekebun	Penyuluh Pertanian Pemkab dan Fasilitator Pendamping Petani yang terlatih dalam penguatan kelompok pekebun	2023	2024	Dinas Pertanian	Mitra Pembangunan	DBH Kelapa Sawit APBD Mitra Pembangunan
10.2	Sosialisasi dan bimbingan dalam pembentukan kelembagaan pekebun	Terlaksananya sosialisasi dan bimbingan dalam pembentukan kelembagaan pekebun di Desa penghasil kelapa sawit secara berkala Terbentuknya lembaga pekebun yang berbadan hukum dalam bentuk Koperasi, dan/atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di ... Desa penghasil kelapa sawit	2023	2024	Dinas Pertanian	1. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) 2. Mitra Pembangunan	DBH Kelapa Sawit APBD Mitra Pembangunan
10.3	Memperkuat kelembagaan pekebun	Meningkatnya kemampuan manajerial pengurus lembaga pekebun dalam mengelola usaha di ...	2023	2024	DKUKMPP	1. Dinas Pertanian 2. Perusahaan Perkebunan Sawit 3. Mitra Pembangunan	DBH Kelapa Sawit APBD Mitra Pembangunan

		Desa penghasil kelapa sawit secara berkala					
10.4	Melakukan pemantauan dan evaluasi kemitraan usaha antara perusahaan (termasuk PKS) dan lembaga pekebun	Tersedianya laporan rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi kemitraan usaha antara perusahaan dan lembaga pekebun secara berkala di desa penghasil kelapa sawit	2023	2024	Dinas Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) 2. Perusahaan Perkebunan 3. Mitra Pembangunan 	DBH Kelapa Sawit APBD Mitra Pembangunan
10.5	Pengembangan kelembagaan pengolahan dan pemasaran produk olahan komoditi perkebunan.	Jumlah kelembagaan pengolahan dan pemasaran produk olahan komoditi perkebunan.	2023	2024	Dinas Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) 	DBH Kelapa Sawit APBN APBD
10.6	Sosialisasi standarisasi, uji mutu dan sertifikasi mutu produk komoditi perkebunan	Terselenggaranya sosialisasi standarisasi, uji mutu dan sertifikasi mutu produk komoditi perkebunan	2023	2024	Dinas Pertanian	Perusahaan PKS	APBD
10.7	Fasilitasi uji mutu dan sertifikasi mutu produk komoditi perkebunan.	Terselenggaranya fasilitasi uji mutu dan sertifikasi mutu produk komoditi perkebunan.		2024	Dinas Pertanian	Perusahaan PKS	DBH Kelapa Sawit Pelaku Usaha
10.8	Fasilitasi kemitraan permodalan dan atau pemasaran produk komoditi perkebunan.	Terselenggaranya fasilitasi kemitraan permodalan dan pemasaran produk komoditi perkebunan.	2023	2024	Dinas Pertanian	Perusahaan PKS	DBH Kelapa Sawit
10.9	Sosialisasi penetapan dan penerapan harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit	Terselenggaranya sosialisasi penetapan dan penerapan harga	2023	2024	Dinas Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan PKS 2. DKUKMPP 	Media Sosial

	dan kemitraan kelembagaan pekebun dengan perusahaan perkebunan mitra.	pembelian tandan buah segar kelapa sawit dan kemitraan kelembagaan pekebun dengan perusahaan perkebunan mitra					
10.10	Partisipasi rapat penetapan harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit produksi pekebun di Kabupaten Bulungan.	Terselenggaranya pelaksanaan rapat penetapan harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit produksi pekebun	2023	2024	Dinas Pertanian	1. Pelaku Usaha 2. GAPKI	APBD
10.11	Pembinaan dan pengawasan penetapan dan penerapan harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit produksi pekebun di Kabupaten Bulungan.	Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan penetapan dan penerapan harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit produksi pekebun	2023	2024	Dinas Pertanian	1. Perusahaan PKS 2. DKUKMPP	APBD
10.12	Tera timbang perusahaan dan pengumpul sawit	Jumlah timbangan yang telah di tera timbangan	2023	2024	DKUKMPP	Dinas Pertanian	APBD
11. Program Peningkatan penyuluhan pertanian di kawasan sentra produksi kelapa sawit							
11.1	Melakukan pemutakhiran jumlah tenaga penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi Aparatur Sipil Negara (ASN), P3K, swadaya masyarakat, dan perusahaan secara berkala	Tersedianya data terkini jumlah tenaga penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi ASN dan Non ASN, swadaya masyarakat, dan perusahaan di Desa penghasil kelapa sawit	2023	2024	Dinas Pertanian	1. BKPSDM 2. Bagian Organisasi	APBD

11.2	Melakukan penguatan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai salah satu pusat kegiatan penyuluhan perkebunan kelapa sawit	Tersedianya BPP yang memiliki kemampuan dalam mendukung kegiatan penyuluhan perkebunan kelapa sawit di ... Desa penghasil kelapa sawit		2024	Dinas Pertanian	1. Perusahaan Perkebunan 2. Mitra Pembangunan	DBH Kelapa Sawit APBD
------	---	--	--	------	-----------------	--	--------------------------

12. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

12.1	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pupuk bersubsidi dan pestisida	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi	2023	2024	DKUKMPP	1. Bappeda & Litbang 2. Dinas Pertanian 3. Dinas Perikanan 4. Dinas Ketahanan Pangan 5. Bagian Perkonomian & SDA 6. Bagian Hukum	APBD
------	---	--	------	------	---------	---	------

C. PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN

Penerapan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada sub komponen ini diarahkan antara lain untuk:

- meningkatkan perlindungan terhadap kawasan bernilai ekosistem penting khususnya yang terdapat dalam kawasan pengembangan perkebunan.
- mencegah dan memberantas pembukaan lahan dengan cara membakar melalui koordinasi dan konsolidasi antar OPD antara lain OPD yang membidangi Pertanian (Perkebunan), Lingkungan Hidup, Kehutanan dan aparat keamanan daerah.
- mendukung komitmen penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dengan mengarahkan pemanfaatan lahan kritis dalam rencana pengembangan pembangunan perkebunan sawit sehingga tidak perlu lagi membuka hutan.
- mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi, pemanfaatan produk kelapa sawit, dan limbah sawit yang berkontribusi pada pengurangan emisi GRK dan menjaga sumber air bersih di kawasan perkebunan.

13. Program Perencanaan, Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Pengawasan Dan Pembinaan Lingkungan Hidup

13.1	Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten	Dokumen RPPLH Kabupaten Bulungan		2024	DLH (menunggu RPPLH Prov)	1. Bappedalitbang 2. Dinas Pertanian	APBD
13.2	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup perusahaan perkebunan	Jumlah dokumen LH beserta persetujuan lingkungan hidup yang telah diterbitkan pada perusahaan perkebunan	2023	2024	DLH	1. Dinas Pertanian 2. Bappedalitbang 3. Bagian Hukum	APBD

13.3	Pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan (PPLH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah dokumen pengawasan usaha dan/atau kegiatan	2023	2024	DLH	1. Dinas Pertanian 2. Bappedalitbang 3. Bagian Hukum	APBD
13.3	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan koordinasi dan sinkronisasi	2023	2024	DLH	1. Dinas Pertanian 2. Bappedalitbang	APBD
14. Program Peningkatan Upaya Konservasi Keanekaragaman hayati dan lanskap perkebunan							
14.1	Inventarisasi dan Pemetaan Keanekaragaman Hayati dan Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	Laporan Keanekaragaman Hayati di Kabupaten Bulungan Laporan sebaran Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	2023		DLH	Dinas Pertanian Bappedalitbang Mitra Pembangunan	APBD APBN Mitra Pembangunan
14.2	Mengembangkan sistem Informasi keanekaragaman Hayati	Adanya sistem Informasi keanekaragaman hayati dan ABKT yang bisa diakses publik		2024	DLH	1. Dinas Pertanian 2. Bappedalitbang 3. Mitra Pembangunan	APBD APBN Mitra Pembangunan
15.3	Pemantauan dan evaluasi pengelolaan keanekaragaman hayati dan Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) di areal perkebunan secara berkelanjutan	Tersedianya laporan hasil pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan pengelolaan keanekaragaman hayati dan Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	2023	2024	DLH	1. Dinas Pertanian 2. Bappedalitbang 3. Mitra Pembangunan 4. Pelaku Usaha Perkebunan	APBD APBN Pelaku Usaha Mitra Pembangunan
		Tersedianya data jumlah perusahaan	2023	2024	DLH	1. Dinas Pertanian 2. Bappedalitbang	APBD APBN

		yang mengelola keanekaragaman hayati dan Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) yang berada di dalam areal usaha perkebunan				3. Mitra Pembangunan 4. Pelaku Usaha Perkebunan	Pelaku Usaha Mitra Pembangunan
14.4	Meningkatkan peran serta pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dalam rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS)	Terlaksananya peran serta pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dalam rehabilitasi DAS	2023	2024	DLH	1. Dinas Pertanian 2. Bappedalitbang 3. Mitra Pembangunan 4. Pelaku Usaha Perkebunan	APBD APBN Pelaku Usaha Mitra Pembangunan
15. Program Pelaksanaan Pencegahan Kebakaran Kebun dan Lahan							
15.1	Memberikan dukungan sarana prasarana untuk pekebun dalam penerapan Pembukaan lahan Tanpa Bakar (PLTB)	tersedia sapras PLTB	2023	2024	BBPBD	1. DLH 2. Dinas Pertanian 3. Bappedalitbang 4. PUPR 5. Camat 6. Pemdes setempat 7. Mitra Pembangunan	APBD APBD PROV APBN Mitra Pembangunan
15.2	Meningkatkan kerjasama Masyarakat Peduli Api (MPA) yang terletak di sekitar perkebunan kelapa sawit untuk mencegah kebakaran lahan dan kebun	Terbentuknya MPA di sekitar perkebunan kelapa sawit	2023	2024	BPBD	1. DLH 2. Dinas Pertanian 3. Bappedalitbang 4. DPUPR 5. Camat 6. Pemdes setempat 7. Mitra Pembangunan 8. Pelaku Usaha Perkebunan	APBD APBN Pelaku Usaha Mitra Pembangunan
		Terlaksananya kerjasama perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan MPA yang terletak di sekitar perkebunan kelapa sawit untuk mencegah	2023	2024	BPBD	1. DLH 2. Dinas Pertanian 3. Bappedalitbang 4. DPUPR 5. Camat 6. Pemdes setempat 7. Mitra Pembangunan	APBD APBN Pelaku Usaha Mitra Pembangunan

		kebakaran lahan dan kebun				8. Pelaku Usaha Perkebunan	
15.3	Menindaklanjuti hasil pemantauan titik api (hotspot) kebakaran lahan dan kebun	Terlaksananya tindaklanjut hasil-hasil pemantauan titik api (hotspot) kebakaran lahan dan kebun secara berkala tindak lanjut hasil pemantauan titik api di kebakaran lahan dan kebun	2023	2024	BPBD	1. DLH 2. Dinas Pertanian 3. Bappedalitbang 4. PUPR 5. Camat 6. Pemdes setempat 7. Mitra Pembangunan 8. Pelaku Usaha Perkebunan	APBD APBN Pelaku Usaha Mitra Pembangunan
16. Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara lintas sektor di kebun dan lahan							
16.1	Melakukan inventarisasi simpanan karbon dan emisi GRK pada perkebunan secara periodik	Tersedianya laporan inventarisasi emisi gas rumah kaca, <i>baseline</i> dan target penurunan emisi pada perkebunan secara periodik		2024	DLH	1. Dinas Pertanian 2. Bappedalitbang 3. Mitra Pembangunan	APBD APBN Mitra Pembangunan
16.2	Melakukan mitigasi penurunan emisi GRK secara terintegrasi di perkebunan kelapa sawit	Turunnya penggunaan pupuk anorganik di perkebunan sebagai upaya mitigasi GRK		2024	DLH	1. Dinas Pertanian 2. Bappedalitbang 3. Mitra Pembangunan	APBD APBN Pelaku Usaha
16.3	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Jumlah dokumen profil GRK Kabupaten Bulungan		2024	DLH	1. Dinas Pertanian 2. Bappedalitbang 3. Mitra Pembangunan	APBD APBN Pelaku Usaha
17. Pengukuran Pelaporan dan Verifikasi (<i>measurement, reportin, and verification</i>/MRV) potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit							
17.1	Melakukan pengukuran potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit	Tersedianya data pengukuran emisi GRK	2023	2024	DLH	1. Dinas Pertanian 2. Bappedalitbang 3. Mitra Pembangunan	APBD APBN Mitra Pembangunan
18. Pemanfaatan Limbah Kelapa Sawit Untuk Peningkatan Rantai Nilai Ekonomi							

18.1	Meningkatkan jumlah perusahaan dan petani/peternak yang mengintegrasikan perkebunan kelapa sawit dan peternakan	Jumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit dan petani/peternak yang mengintegrasikan perkebunan kelapa sawit dengan peternakan		2024	Dinas Pertanian	1. Pelaku usaha 2. Pemdes	APBD Pelaku Usaha
18.2	Melaksanakan kajian studi kelayakan tentang pemanfaatan limbah padat dan limbah cair kelapa sawit untuk berbagai kepentingan	Tersedianya hasil kajian dan berbagai pengetahuan tentang tata cara pemanfaatan limbah untuk berbagai kepentingan	2023	2024	Bappedalitbang	1. Dinas Pertanian 2. DLH 3. Mitra Pembangunan	APBD APBN Mitra Pembangunan
19. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian							
19.1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Lahan yang dikendalikan	2023	2024	Dinas Pertanian	Pelaku Usaha	APBD APBD Prov
19.2	Pengamatan dan pelaporan OPT	Laporan pengamatan OPT	2023	2024	Dinas Pertanian	Pelaku Usaha	APBD APBD Prov
19.3	Pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman perkebunan, terdiri dari : a) Pembangunan water management di areal perkebunan rakyat b) Pengadaan alat mesin pertanian(excavator) c) Pencegahan dan penanganan kebakaran lahan perkebunan	Terlaksananya pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha perkebunan	2023	2024	Dinas Pertanian & BPBD	1. DLH 2. DPUPR 3. Pelaku Usaha 4. GAPKI	- APBN - Pelaku Usaha - Mitra Pembangunan

20. Program Peningkatan Pemanfaatan Produk Kelapa Sawit Sebagai Energi Terbarukan Dalam Rangka Ketahanan Energi

20.1	Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan <i>Palm Oil Mill Effluent (POME)</i> sebagai energi terbarukan	Tersedianya laporan hasil Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan <i>POME</i> sebagai energi alternatif Meningkatkan jumlah kerjasama perusahaan kelapa sawit dengan Perusahaan Listrik Negara dalam pemanfaatan <i>POME</i> sebagai energi terbarukan	?	?	?	1. Pelaku Usaha	Pelaku Usaha
------	--	---	---	---	---	-----------------	--------------

D. TATA KELOLA PERKEBUNAN DAN PENANGANAN SENGKETA

Penerapan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada sub komponen ini diarahkan antara lain untuk:

- a. mempercepat realisasi kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit berkelanjutan bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan melalui pengawasan dari pemberi izin dan komitmen dari sektor swasta.
- b. melakukan penanganan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di kawasan area penggunaan lain diantaranya terkait plasma, ketenagakerjaan, dampak lingkungan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar.
- c. memfasilitasi percepatan penyelesaian status dan legalisasi lahan perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan maupun di ekosistem gambut melalui koordinasi antar OPD.
- d. melaksanakan review regulasi daerah terkait penyelenggaraan ketenagakerjaan dalam usaha perkebunan kelapa sawit.

21. Program Percepatan realisasi kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit berkelanjutan bagi masyarakat

21.1	Melakukan Review terhadap pencapaian dan kendala fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat pada masing-masing perusahaan	Dokumentasi hasil identifikasi pencapaian dan kendala perusahaan dalam fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat pada masing-masing perusahaan	2023		Dinas Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. DKUKMPP 2. Bappeda dan Litbang 3. Perguruan Tinggi 4. DPMD 5. Bagian Perekonomian & SDA 6. Pelaku Usaha Perkebunan 7. Mitra Pembangunan 	APBD
------	---	---	------	--	-----------------	--	------

21.2	Lokakarya dengan Pelaku Usaha untuk merumuskan upaya percepatan dan model fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit atau model lainnya sesuai Permentan 18/2021	Dokumen skema upaya percepatan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sesuai dengan pasal 2 Permentan 18/2021	2023		Dinas Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. DKUKMPP 2. Perguruan Tinggi 3. DPMD 4. Bagian Perekonomian & SDA 5. Pelaku Usaha Perkebunan 6. Mitra Pembangunan 	APBD
21.3	Upaya penyelesaian perselisihan/konflik kemitraan antara masyarakat dengan perusahaan	Termediasi perundingan antara masyarakat dengan pelaku usaha perkebunan dalam upaya penyelesaian perselisihan/konflik kemitraan	2023	2024	Dinas Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten II 2. DKUKMPP 3. DPMD 4. Camat 5. Pemdes 	DBH Kelapa Sawit APBD
22. Program Melakukan Penanganan Sengketa Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Kawasan Area Penggunaan Lain							
22.1	Pembentukan tim mediasi penanganan sengketa/konflik lahan di Kabupaten Bulungan	Terbentuknya tim mediasi penanganan sengketa lahan di Kabupaten Bulungan	2023	2024	Dinas Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten I 2. Asisten II 3. Tapem 4. DPMD 5. Badan Kesbangpol 6. Bagian Hukum 7. Camat 8. Pemdes 9. Kantor Pertanahan ATR/BPN Kab. Bulungan 	APBN APBD
22.2	Penyusunan data pemetaan kasus pertanahan di Kabupaten Bulungan	Tersedianya data pemetaan kasus pertanahan di Kabupaten Bulungan	2023	2024	Dinas Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten I 2. Asisten II 3. Tapem 4. DPMD 5. Badan Kesbangpol 6. Bagian Hukum 7. Camat 8. Pemdes 9. Kantor Pertanahan ATR/BPN Kab. Bulungan 	APBN
22.3	Pelatihan mediator penanganan	Tersedianya tenaga	2023	2024	Dinas Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten I 	APBN

	kasus lahan	mediator untuk kasus lahan				<ol style="list-style-type: none"> 2. Asisten II 3. Tapem 4. DPMD 5. Badan Kesbangpol 6. Bagian Hukum 7. Camat 8. Pemdes 9. Kantor Pertanahan ATR/BPN Kab. Bulungan 		
22.4	Pembentukan tim reforma agraria tingkat Kabupaten Bulungan	Terlaksananya program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	2023	2024	Dinas Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten I 2. Asisten II 3. Tapem 4. DPMD 5. Badan Kesbangpol 6. Bagian Hukum 7. Camat 8. Pemdes 9. Kantor Pertanahan ATR/BPN Kab. Bulungan 	APBN APBD Prov Kaltara	
22.5	Penyelesaian sengketa pada lahan HGU	Tim Penyelesaian Konflik	2023	2024	Kantor Pertanahan ATR/BPN Kab. Bulungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten II 2. Tapem 3. DPMD 4. Badan Kesbangpol 5. Bagian Hukum 6. Camat 7. Pemdes 	APBN	
22.6	Melakukan evaluasi perkembangan penanganan sengketa lahan	Tersedianya hasil evaluasi dan rekomendasi penanganan sengketa lahan Berkurangnya sengketa lahan di wilayah perkebunan kelapa sawit	2023	2024	Dinas Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten II 2. Tapem 3. DPMD 4. Badan Kesbangpol 5. Bagian Hukum 6. Camat 7. Pemdes 8. Kantor Pertanahan ATR/BPN Kab. Bulungan 	APBN	
23. Program Penyelesaian status lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan								

23.1	Pembentukan tim koordinasi dengan KPH Bulungan dan Tarakan untuk identifikasi dan penyelesaian kebun sawit di dalam Kawasan Hutan	Terbentuknya tim Koordinasi Identifikasi dan Penyelesaian Kebun Sawit di dalam Kawasan Hutan Kabupaten Bulungan	2023	2024	Dinas Pertanian	1. Bagian Ekonomi 2. PUPR 3. Bappeda dan litbang 4. Badan Kesbangpol 5. Kantor Pertanahan Kab. Bulungan 6. KPH Bulungan dan Tarakan	APBN
23.2	Melaksanakan pendataan lahan perkebunan kelapa sawit masyarakat yang terindikasi dalam kawasan hutan	Tersedianya data lahan perkebunan kelapa sawit masyarakat yang terindikasi dalam kawasan hutan	2023	2024	Dinas Pertanian	1. Asisten II 2. Bappedalitbang 3. Badan Kesbangpol 4. Kantor Pertanahan Kab. Bulungan 5. KPH Bulungan dan Tarakan	APBN
		Tersedianya peta indikatif dan permasalahan lahan perkebunan kelapa sawit masyarakat yang terindikasi dalam kawasan hutan					
		Tersedianya database dan hasil verifikasi data kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi di dalam kawasan hutan					
23.3	Memfasilitasi penyelesaian permasalahan kebun sawit di dalam kawasan hutan	Adanya mekanisme penyelesaian permasalahan kebun sawit di dalam kawasan hutan	2023	2024	Dinas Pertanian	1. Asisten II 2. Bappedalitbang 3. Badan Kesbangpol 4. Kantor Pertanahan Kab. Bulungan 5. KPH Bulungan dan Tarakan	APBN
24. Program ketenagakerjaan dan diseminasi terkait pengawasan atas pelaksanaan sistem Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Sosial Tenaga Kerja dalam usaha perkebunan kelapa sawit							
24.1	Meningkatkan sosialisasi dan diseminasi regulasi kepada perusahaan dan pekebun kelapa sawit meliputi penyampaian dan penanganan permasalahan, K3, serta jaminan sosial ketenagakerjaan	Terlaksananya sosialisasi dan diseminasi regulasi kepada perusahaan dan pekebun kelapa sawit meliputi penyampaian dan	2023	2024	Disnakertrans	1. Dinas Pertanian 2. Pelaku Usaha 3. Serikat Buruh/Pekerja di Kebun Sawit 4. Mitra Pembangunan	APBD

		penanganan permasalahan, K3, serta jaminan sosial ketenagakerjaan secara berkala					
24.2	Memfasilitasi penyelesaian sengketa ketenaga kerjaan di sektor perkebunan sawit	Jumlah sengketa yang difasilitasi	2023	2024	Disnakertrans	1. Dinas Pertanian 2. Pelaku Usaha 3. Organisasi Buruh/Pekerja di Kebun Sawit 4. MITRA PEMBANGUNAN	APBD
24.3	Pendataan kondisi dan potensi Hubungan Industri di bidang perkebunan kelapa sawit	Data jumlah tenaga kerja dibidang perkebunan kelapa sawit pada perusahaan	2023	2024	Distranaker	1. Dinas Pertanian 2. Pelaku Usaha 3. Dinas Tenaga Kerja Prov. Kaltara 4. Serikat Buruh/Pekerja di Perusahaan Kelapa Sawit 5. Mitra Pembangunan	APBD
25. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup							
25.1	Penyelesaian pengaduan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Jumlah penyelesaian kasus	2023	2024	DLH	1. Dinas Pertanian	APBD
E. PERCEPATAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI ISPO DAN PENINGKATAN AKSES PASAR PRODUK SAWIT							
Penerapan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada sub komponen ini diarahkan antara lain untuk:							
<ul style="list-style-type: none"> a. menjamin pemahaman ISPO secara luas di antara pemangku kepentingan di daerah melalui berbagai kegiatan sosialisasi. b. mempercepat pelaksanaan sertifikasi ISPO untuk pekebun melalui pembinaan kepada pekebun maupun pengembangan model kemitraan pemerintah dan perusahaan (<i>public-private partnership</i>) ataupun dengan pihak lain. c. meningkatkan peran usaha masyarakat di bidang hilirisasi perkebunan kelapa sawit untuk berpartisipasi dalam promosi produk ekspor unggulan baik itu melalui misi dagang maupun pameran dagang. 							
26. Program Pelaksanaan Sosialisasi ISPO untuk pemangku kepentingan di Kabupaten Bulungan							
26.1	Sosialisasi ISPO Kepada Pemegang Izin Perkebunan Kelapa Sawit dan Pekebun Mandiri	Meningkatnya jumlah para pihak yang memahami pentingnya sertifikasi ISPO	2023	2024	Dinas Pertanian	1. Bagian Perekonomian Sekda 2. DLH 3. DKUKMPP	DBH Kelapa Sawit

		Meningkatnya jumlah perusahaan dan pekebun yang mendapatkan sertifikat ISPO					
27. Program Percepatan Pelaksanaan Sosialisasi ISPO untuk pemangku kepentingan di Kabupaten Bulungan							
27.1	Memfasilitasi kerjasama pekebun calon sertifikasi ISPO dengan pabrik kelapa sawit yang sudah sertifikasi ISPO	Adanya MoU Kerjasama antara pekebun dengan PKS untuk menerima TBS yang sertifikasi ISPO	2023	2024	Dinas Pertanian	1. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) 2. Bagian Perekonomian & SDA	DBH Kelapa Sawit APBD
27.2	Memfasilitasi masyarakat untuk proses sertifikasi ISPO	Meningkatnya jumlah pekebun atau kelompok pekebun yang sertifikasi ISPO	2023	2024	Dinas Pertanian	Bagian Perekonomian & SDA	DBH Kelapa Sawit BPDKS APBD
27.3	Memberikan penghargaan dan Intensif kepada pekebun yang telah bersertifikat ISPO	Terselenggaranya pelatihan ISPO bagi pekebunan		2024	Dinas Pertanian	Bagian Perekonomian & SDA	DBH Kelapa Sawit APBD
27.4	Meningkatkan jumlah dan kapasitas Petugas Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) dan dana Pemerintah Daerah untuk proses penilaian kebun sebagai prasyarat mendapatkan sertifikat ISPO	Meningkatnya jumlah kapasitas PUP dan dana di daerah untuk kegiatan pelaksanaan penilaian usaha perkebunan Meningkatnya jumlah perusahaan yang sudah mendapatkan penilaian kelas kebun sebagai syarat mendapatkan ISPO	2023	2024	Dinas Pertanian	1. DKUKMPP 2. Bagian Perekonomian & SDA 3. Bappedalitbang 4. Dinas Lingkungan Hidup 5. Dinas Tenaga Kerja 6. Kantor Pertanahan ATR/BPN Bulungan	DBH Kelapa Sawit APBD
27.5	Mengikuti pelatihan ISPO untuk petugas di kabupaten Bulungan	Meningkatnya jumlah petugas pendamping untuk sertifikasi ISPO	2023	2024	Dinas Pertanian	Mitra Pembangunan	DBH Kelapa Sawit APBD

27.6	Membentuk kelompok kerja sebagai wadah quality control, informasi dan konsultasi ISPO	Terbentuknya kelompok Quality control internal (ICS)	2023	2024	Dinas Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. DKUKMPP 2. Bagian Perekonomian & SDA 3. Bappedalitbang 4. Dinas Lingkungan Hidup 5. Dinas Tenaga Kerja 6. Kantor Pertanahan ATR/BPN Bulungan 7. Mitra Pembangunan 	DBH Kelapa Sawit APBD
------	---	--	------	------	-----------------	--	-----------------------

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



SUROSO, SE

Pembina TK.I/IVb

NIP. 197003101993031008